

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Angelina Vrillia, Rudin M, Rika Suprpty

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido
Palu. Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur Kota Palu
Sulawesi Tengah

Email: angelinavrillia4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sistem akuntansi keuangan sebagai instrumen dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan dengan mengkaji penerapan sistem akuntansi berdasarkan komponen input, proses, output, kontrol, dan sumber daya, serta menilai kesesuaiannya dengan regulasi akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah secara umum telah berjalan dengan baik. Proses pencatatan transaksi keuangan telah dilakukan secara sistematis, dan laporan keuangan yang dihasilkan meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antarunit kerja guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: sistem akuntansi keuangan, standar akuntansi pemerintahan, akuntabilitas keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the financial accounting system and to identify the obstacles encountered in the process of preparing and presenting financial statements at the Tourism Office of Central Sulawesi Province. This research is motivated by the importance of the financial accounting system as an instrument for realizing transparency and accountability in regional financial management. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, documentation, and literature review. Data analysis was conducted by examining the implementation of the accounting system based on the components of input, process, output, control, and resources, as well as assessing its conformity with the applicable government accounting regulations. The results of the study indicate that the implementation of the financial accounting system at the Tourism Office of Central Sulawesi Province has generally been carried out effectively. The process of recording financial transactions has been conducted systematically, and the resulting financial statements include the Statement of Financial Position (Balance Sheet), Operational Statement, Cash Flow Statement, Statement of Changes in Equity, and Notes to the Financial Statements. The implemented system has also been able to support the periodic and structured presentation of financial information, optimize the use of information technology, and strengthen coordination among work units in order to improve the quality of financial statements and promote greater transparency and accountability.

Keywords: *financial accounting system, government accounting standards, regional financial accountability, transparency in financial management, local government.*

A. PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntansi memberikan informasi yang akurat terkait penerimaan dan pengeluaran, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah menjalankan prinsip akuntabilitas dan

transparansi. Akuntansi sektor publik mencakup proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan transaksi keuangan instansi publik dengan maksud memberikan data yang berguna untuk pengambilan keputusan serta memastikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Mardiasmo 2018). Oleh sebab itu, sistem akuntansi keuangan bukan sekadar teknis pencatatan, melainkan fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.¹

Pengelolaan keuangan publik merupakan isu global yang menjadi perhatian hampir seluruh negara. Organisasi internasional seperti *International Federation of Accountants* (IFAC) dan *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) telah mendorong penerapan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) sebagai kerangka akuntansi pemerintahan yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal. Penerapan IPSAS di berbagai negara terbukti mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, memperkuat kepercayaan publik, serta memudahkan akses pemerintah terhadap pendanaan internasional. Penelitian di negara-negara berkembang Afrika menunjukkan bahwa adopsi IPSAS memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi fiskal, meskipun tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan utama.

Dalam beberapa tahun terakhir, landasan hukum akuntansi pemerintahan Indonesia mengalami pembaruan penting yang memperjelas dan memperluas ruang lingkup penggunaan SAP

¹ Badewin, E., Roosganda, E., Rusmardiana, A., & Judijanto, L. (2025). Accountability and transparency in local government financial reporting: An empirical study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831–842.

berfokus pada akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetap menjadi kerangka dasar SAP yang mewajibkan penerapan prinsip akuntansi pemerintahan (termasuk PSAP dan penerapan akrual), sementara pada akhir 2024 Kementerian Keuangan mempublikasikan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yaitu PMK Nomor 122 Tahun 2024 (PSAP Akrual No.18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran) dan PMK Nomor 123 Tahun 2024 (PSAP Akrual No.19 tentang Pengaturan Bersama). Kedua PMK ini mengatur secara rinci pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jenis pendapatan serta pengaturan pelaporan untuk kasus kerjasama/pengelolaan bersama antar-entitas, sehingga memperjelas perlakuan akuntansi atas sumber pendapatan dan skema kerjasama yang selama ini menjadi tantangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.²

Di tingkat penyusunan anggaran dan administrasi keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri juga memperbarui pedoman teknis penyusunan APBD yang relevan bagi penerapan sistem akuntansi daerah. Pedoman penyusunan APBD untuk tahun-tahun anggaran terbaru dirumuskan melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 (Pedoman Penyusunan APBD TA 2025) dan diikuti oleh pedoman/aturan lanjutan untuk penyusunan APBD TA 2026 dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, yang menekankan harmonisasi klasifikasi belanja, penandaan belanja tematik, integrasi data keuangan daerah ke sistem pemerintahan elektronik, serta peningkatan kapasitas SDM akuntansi daerah. Implikasi praktisnya bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah kebutuhan menyesuaikan SAKD (sistem akuntansi keuangan

² Equivalent. (2023). Analysis of the implementation of government accounting system at the Gunungsitoli Utara District Office. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi*.

daerah), prosedur pencatatan pendapatan dari sektor pariwisata (PNBP, retribusi, hibah, sponsor), serta memperkuat pengendalian intern dan infrastruktur Teknologi Informasi agar laporan keuangan yang disusun memenuhi PSAP berbasis akrual dan pedoman penyusunan APBD yang baru.

Selain regulasi nasional, pemerintah daerah juga memiliki payung hukum untuk mengatur pengelolaan keuangannya. Pada Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang inti dari sebuah manajemen Keuangan Daerah, yang menkoordinir prinsip transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pelaksanaan anggaran. Aturan ini menjadi acuan bagi semua perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata, dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran daerah.³

Pariwisata berfungsi sebagai sektor utama dalam pembangunan daerah yang dapat memberikan andil nyata secara masif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi wisata di Sulawesi Tengah sangat beragam, mulai dari wisata bahari, budaya, hingga ekowisata. Dinas Pariwisata sebagai instansi teknis memiliki tanggung jawab mengelola program pembangunan pariwisata, mempromosikan potensi lokal, serta memastikan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran. Pengelolaan keuangan yang transparan pada instansi pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat legitimasi publik terhadap pemerintah (Pratiwi & Nugroho 2021). Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang baik dalam sektor pariwisata bukan sekadar aspek administratif, tetapi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah.

³ Hall, J. A. (2020). *Accounting information systems* (10th ed.). Boston: Cengage Learning.

Meski regulasi telah jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pemahaman terhadap SAP, serta lambannya penyusunan laporan keuangan sering menjadi hambatan. Penelitian Rahman (2020) menunjukkan bahwa banyak OPD mengalami kesulitan dalam menyesuaikan laporan keuangan dengan SAP, terutama terkait klasifikasi belanja dan pencatatan aset tetap. Masalah ini bisa memengaruhi mutu laporan keuangan yang disusun, sekaligus mengurangi tingkat pertanggungjawaban kepada publik.

Selain itu, faktor teknologi dan sistem informasi akuntansi juga berperan dalam mendukung kualitas laporan keuangan. Menurut Siregar (2019), Sistem informasi akuntansi yang terintegrasi berpotensi mendorong efisiensi, kecepatan, dan ketepatan dalam pembuatan laporan keuangan, akan tetapi implementasinya di tingkat pemerintah daerah masih terkendala keterbatasan dana dan kesiapan pegawai. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem akuntansi keuangan tidak semata ditentukan oleh regulasi, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia serta ketersediaan infrastruktur pendukung.⁴

Lebih spesifik, sektor pariwisata sebagai salah satu sektor potensial dalam pembangunan daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan tersendiri dalam pengelolaan keuangan. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pengembangan destinasi dan promosi, tetapi juga dalam pengelolaan dana publik untuk berbagai program dan

⁴ Tabupook, A., & Wulandari, R. (2024). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 12(1), 45–56.

kegiatan, seperti penyelenggaraan event, infrastruktur wisata, dan kerjasama dengan komunitas lokal. Pengelolaan keuangan yang tidak efektif, lemahnya pengendalian, atau sistem akuntansi yang kurang sesuai dapat menyebabkan inefisiensi, kesalahan pencatatan, atau bahkan kerugian yang merugikan masyarakat dan pemerintah.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, hingga saat ini belum cukup empiris data publik yang menunjukkan bagaimana Dinas Pariwisata menerapkan sistem akuntansi keuangannya, apa saja hambatan struktur internal dan eksternal, serta sejauh mana penerapan tersebut mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Kondisi geografis, luas wilayah, variabilitas destinasi wisata, serta kemampuan SDM dan sarana teknologi di Sulawesi Tengah memungkinkan adanya tantangan berbeda dibanding daerah lain di Indonesia bagian barat atau Jawa.

Hasil observasi awal peneliti di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa pemanfaatan aplikasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan belum dilakukan secara optimal pada seluruh tahapan pekerjaan. Akibatnya, beberapa proses masih memerlukan pengolahan data secara manual yang dapat memengaruhi efisiensi waktu serta meningkatkan risiko terjadinya ketidaksesuaian data dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.⁵ Kendala utama muncul ketika laporan keuangan yang telah disusun disampaikan kepada tim verifikator di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), di mana sering kali ditemukan perbedaan antara realisasi kegiatan dan alokasi anggaran, sehingga laporan harus mengalami beberapa kali

⁵ Tabupook, A., & Wulandari, R. (2024). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 12(1), 45–56.

revisi sebelum dinyatakan valid. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan di dinas belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal ketepatan pencatatan, kesesuaian dengan regulasi anggaran terbaru, serta koordinasi antarunit pengelola keuangan. Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, total aset yang dimiliki per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.783.009.566,16, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp53.912.860.872,16. Selain itu, nilai ekuitas juga mengalami penurunan dari Rp53.899.014.897,16 pada tahun 2023 menjadi Rp49.772.708.111,16 pada tahun 2024. Sementara itu, kewajiban tercatat sebesar Rp10.301.455,00.

Data tersebut menunjukkan adanya perubahan posisi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah selama periode pelaporan. Perubahan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas tersebut menuntut adanya sistem akuntansi keuangan yang mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat, andal, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi keuangan menjadi aspek penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk melakukan kajian mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana sistem akuntansi keuangan diterapkan, kendala yang dihadapi, serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas

⁶ Sumual, E. M., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2016). Analisis efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 273–284.

pengelolaan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola keuangan di sektor pariwisata daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan standar dan regulasi akuntansi pemerintahan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem akuntansi keuangan di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, tanpa bermaksud menguji hipotesis atau mengukur pengaruh antar variabel. Menurut Sugiyono, Metode penelitian kualitatif dilaksanakan pada objek dengan kondisi apa adanya, dan peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan datanya melalui triangulasi, analisis yang digunakan bersifat induktif, sedangkan hasil penelitian lebih berorientasi pada makna ketimbang generalisasi.⁷

⁷ Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sebagaimana dikemukakan Moleong, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang diuraikan secara mendalam dalam bentuk deskripsi kata-kata pada konteks alamiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji secara komprehensif praktik penerapan sistem akuntansi keuangan, tingkat kepatuhannya terhadap regulasi, hambatan yang muncul, serta langkah-langkah perbaikan yang ditempuh instansi guna menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberi kontribusi nyata dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah.⁸

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi

Tengah

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Keberadaan dinas ini didasarkan pada prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah, termasuk sektor pariwisata.

Secara teknis, penyelenggaraan kepariwisataan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menjadi landasan utama dalam pengembangan, pengelolaan, dan promosi sektor pariwisata di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, termasuk sistem akuntansi yang diterapkan, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

⁸ Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, serta ekonomi kreatif;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan kepariwisataan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas, termasuk pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
 - a) Visi

Visi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada visi pembangunan daerah, yaitu *“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.”* Visi tersebut menjadi landasan dalam pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendukung misi pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Adapun misi yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata meliputi:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta penciptaan lapangan kerja.
- 2) Menciptakan masyarakat yang sejahtera dan produktif melalui penguatan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan daerah, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan guna mendukung pengembangan destinasi pariwisata.
- 4) Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berfikir cerdas, dan berbasis kolaborasi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah.

Pembentukan dan susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur. Secara khusus, struktur organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

2. Deskripsi Sistem Akuntansi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode pelaporan. Laporan ini digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Wawancara Bersama Ibu Febriyanti S.Si yang mengatakan :

“Di dalam aplikasi sudah ada semua data keuangan LRA, Neraca, Dan lain-lain” (2026/03/19)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dilakukan dengan menggunakan data pagu anggaran dan realisasi belanja yang tersedia dalam aplikasi keuangan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkan jumlah anggaran yang direncanakan pada awal tahun dengan jumlah belanja yang terealisasi, sehingga diperoleh persentase tingkat penyerapan anggaran.⁹ Proses penyusunan laporan tersebut juga didukung oleh dokumen keuangan seperti kwitansi, SPD, SPP, SPM, dan SP2D yang saling berkaitan sebagai dasar pencatatan transaksi. Seluruh data keuangan telah tersedia dalam sistem aplikasi sehingga laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan laporan lainnya dapat dihasilkan secara terintegrasi.

Hal ini sejalan dengan dokumen kinerja yang dipublikasikan pada situs resmi dinas, dimana laporan keuangan dan laporan

⁹ Tabupook, A., & Wulandari, R. (2024). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 12(1), 45–56.

kinerja disusun setiap tahun sebagai bagian dari akuntabilitas instansi pemerintah. Dokumen tersebut tersedia dalam bentuk laporan akuntabilitas yang dipublikasikan secara berkala oleh dinas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah mengacu pada struktur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Komponen laporan disusun berdasarkan pagu anggaran dan realisasi belanja, kemudian disajikan dalam bentuk persentase tingkat penyerapan anggaran. Dengan demikian, laporan tersebut telah digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan anggaran dan mendukung pengambilan keputusan berbasis sistem keuangan daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih selama satu periode pelaporan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai perubahan saldo anggaran yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan penggunaannya pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Wawancara Bersama Ibu Febriyanti S.Si yang mengatakan :

“Dari situ nanti akan di narasikan dengan kalimat bahwa dinas pariwisata pagu nya sekian yang di belanjakan sekian, berarti realisasinya dalam bentuk presentase itu berapa dari saldo yang digunakan dan sisanya berapa” (2026/02/10)¹⁰

¹⁰ United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk laporan perubahan saldo anggaran, berasal dari pagu anggaran dan realisasi belanja yang tersedia dalam aplikasi keuangan daerah. Data tersebut kemudian diolah dengan membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasi penggunaan anggaran untuk mengetahui sisa anggaran pada akhir periode.

Dalam proses penyusunannya, bagian keuangan mengumpulkan data dari laporan belanja serta pagu anggaran yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui jumlah saldo anggaran yang masih tersisa setelah pelaksanaan kegiatan. Sisa anggaran tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan laporan perubahan saldo anggaran pada akhir tahun anggaran. Selain itu, penyusunan laporan ini juga dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan daerah yang telah terintegrasi, sehingga data saldo anggaran dapat ditampilkan secara otomatis berdasarkan realisasi kegiatan. Bagian keuangan kemudian menarasikan hasil tersebut dengan menjelaskan jumlah pagu yang direncanakan, jumlah anggaran yang telah dibelanjakan, serta persentase realisasi dan sisa anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan tersebut disusun berdasarkan data pagu anggaran dan realisasi belanja, serta digunakan untuk mengetahui perubahan

saldo anggaran selama satu periode pelaporan sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.¹¹

3. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Penyusunan Neraca pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan penyajian informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, serta kekayaan bersih pemerintah daerah.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024, posisi keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa jumlah aset sebesar Rp49.783.009.566,16. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp53.912.860.872,16. Penurunan ini menunjukkan adanya pengurangan nilai aset selama periode pelaporan.

Aset tersebut terdiri dari beberapa komponen yaitu aset lancar sebesar Rp592.000,00, investasi jangka panjang sebesar Rp28.029.462.348,00, aset tetap sebesar Rp19.334.960.819,16, dan aset lainnya sebesar Rp2.417.994.399,00. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aset dinas berada pada investasi jangka panjang dan aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional.

Selain aset, Neraca juga menyajikan kewajiban yang merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, jumlah kewajiban pada dinas sebesar

¹¹ Sumual, E. M., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2016). Analisis efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 273–284.

Rp10.301.455,00. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.845.975,00. Kewajiban tersebut berasal dari utang tagihan listrik pada tahun berjalan.¹²

Komponen terakhir dalam Neraca adalah ekuitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.772.708.111,16. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp53.899.014.897,16. Penurunan ekuitas tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai aset dan hasil operasional selama tahun anggaran berjalan.

Dengan demikian, Neraca pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas secara lengkap. Selain itu, berdasarkan analisis vertikal, jumlah aset sebesar Rp49.783.009.566,16 telah sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas, sehingga menunjukkan keseimbangan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan operasional, beban operasional, serta surplus atau defisit dari kegiatan operasional dalam satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Operasional pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang bertujuan untuk menilai kinerja operasional instansi pemerintah.

¹² Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2024). Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(1), 59–70.

Laporan Operasional terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan operasional, beban operasional, dan surplus atau defisit operasional. Pendapatan operasional merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode berjalan. Beban operasional merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang ekuitas selama periode pelaporan. Selisih antara pendapatan operasional dan beban operasional menghasilkan surplus atau defisit operasional yang mencerminkan kinerja keuangan instansi.¹³

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024, pendapatan operasional pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah relatif kecil karena instansi ini bukan merupakan perangkat daerah penghasil pendapatan, melainkan berfungsi sebagai pelaksana program pembangunan pariwisata. Beban operasional terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, serta beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan operasional dinas. Wawancara Bersama Ibu Febriyanti S.Si yang mengatakan :

“Kalau tahun kemarin kita pakai jasa dari orang akuntansi sebagai pendamping, kita akan kasih data nya seperti BKU, LRA, Buku bank dll. Nanti mereka yang akan olah datanya. Tapi tahun ini kita sudah olah datanya sendiri, kita kumpul berapa pagu yang kita rencanakan di awal dan anggaran belanja dari situ akan kami olah datanya” (2026/02/10)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Operasional dilakukan menggunakan data yang

¹³ Sari, A., & Wahyuni, L. A. (2023). Analisis pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kinerja SDM terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *JAKU: Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 59–66.

bersumber dari sistem aplikasi keuangan daerah. Data tersebut berasal dari pencatatan transaksi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta beban penyusutan yang dihitung berdasarkan nilai aset yang dimiliki dinas. Proses penyusunan dilakukan pada akhir periode pelaporan setelah seluruh transaksi keuangan diverifikasi oleh bagian keuangan.

Selain itu, dokumen yang tersedia pada website resmi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa laporan keuangan termasuk laporan operasional merupakan bagian dari dokumen akuntabilitas yang dipublikasikan secara berkala melalui menu informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa instansi telah menerapkan prinsip transparansi dalam penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan perbandingan antara pendapatan operasional dan beban operasional, dinas mengalami defisit operasional. Kondisi tersebut merupakan hal yang wajar pada organisasi perangkat daerah karena tujuan utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk memperoleh keuntungan. Defisit operasional tersebut kemudian ditutup melalui mekanisme pendanaan dari anggaran pemerintah daerah.

Dengan demikian, Laporan Operasional pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, serta didukung oleh data Catatan atas Laporan Keuangan, hasil wawancara, dan dokumen resmi yang dipublikasikan melalui website instansi. Sugiyono (2020),¹⁴

¹⁴ Safitri, E., Amiruddin, Selong, A., Tenriwaru, & Basalamah, M. S. A. (2023). Pemahaman standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. *Center of Economic Students Journal*, 6(1), 22–30.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas pada suatu entitas pemerintah selama periode tertentu. Penyusunan Laporan Arus Kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kemampuan instansi dalam memperoleh dan menggunakan kas dalam kegiatan operasional. Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, laporan arus kas pada dasarnya tidak disusun secara terpisah pada tingkat perangkat daerah. Hal ini dikarenakan penyusunan Laporan Arus Kas dilakukan secara terpusat oleh pemerintah provinsi sebagai entitas pelaporan. Dengan demikian, perangkat daerah hanya menyusun laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan laporan lainnya yang menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024, tidak terdapat penyajian Laporan Arus Kas secara khusus pada tingkat perangkat daerah karena transaksi kas dikelola melalui mekanisme kas daerah yang terpusat pada bendahara umum daerah. Oleh karena itu, seluruh arus kas yang terjadi pada dinas tercermin dalam laporan arus kas pemerintah provinsi secara keseluruhan. Wawancara Bersama Ibu Febriyanti S.Si selaku Bendahara Pengeluaran yang mengatakan :

“Bendahara bayar dulu ke PPPK, mereka akan ajukan pencairan dana setelah di acc oleh kadis, lalu kadis akan perintah untuk bayar setelah itu bendahara bayarkan, lalu mereka akan melakukan kegiatan dengan uang yang saya berikan tadi, lalu mereka SPD kan ke bendahara dan bendahara SPP kan, jadi kalau sudah selesaikan

tanggung jawab PPPK akan mengembalikan uang itu ke bendahara dalam bentuk tunai” (2026/02/10)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan kas pada dinas dilakukan melalui mekanisme uang persediaan dan penggantian langsung. Setiap pengeluaran kas dicatat oleh bendahara pengeluaran dan dilaporkan melalui sistem aplikasi keuangan daerah, kemudian direkapitulasi pada tingkat pemerintah provinsi. Dengan demikian, dinas tidak menyusun laporan arus kas secara mandiri.¹⁵

Selain itu, informasi yang tersedia pada dokumen publik di website resmi instansi menunjukkan bahwa laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah secara konsolidasi. Hal ini menegaskan bahwa perangkat daerah hanya menjadi unit akuntansi yang menyampaikan data transaksi kas kepada pemerintah provinsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tidak menyusun Laporan Arus Kas secara terpisah, namun transaksi kas yang terjadi telah dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari laporan arus kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas suatu entitas pemerintah selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menunjukkan perubahan kekayaan bersih yang dimiliki instansi sebagai akibat dari kegiatan operasional. Penyusunan Laporan Perubahan

¹⁵ Putri, R. A., & Widiyanti, L. (2021). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4), 1–18. Retrieved from

Ekuitas pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari beberapa komponen yaitu ekuitas awal, surplus atau defisit laporan operasional, koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas, serta ekuitas akhir. Komponen-komponen tersebut menunjukkan perubahan nilai kekayaan bersih instansi selama periode pelaporan.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024, ekuitas awal pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp53.899.014.897,16. Selama tahun anggaran berjalan terjadi perubahan yang dipengaruhi oleh defisit laporan operasional serta penyesuaian nilai aset. Perubahan tersebut menyebabkan nilai ekuitas mengalami penurunan pada akhir periode pelaporan.

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp49.772.708.111,16. Penurunan nilai ekuitas tersebut dipengaruhi oleh defisit operasional serta perubahan nilai aset tetap yang dimiliki instansi selama periode pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan ekuitas pada dinas sangat dipengaruhi oleh aktivitas operasional dan penyesuaian nilai aset.

Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas dilakukan secara otomatis melalui aplikasi sistem keuangan daerah yang mengolah data dari laporan operasional dan Neraca. Data tersebut kemudian diverifikasi sebelum disampaikan sebagai bagian dari laporan keuangan instansi.

Selain itu, dokumen yang dipublikasikan melalui website resmi instansi menunjukkan bahwa laporan perubahan ekuitas merupakan bagian dari laporan keuangan yang disusun untuk

memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, laporan ini digunakan untuk menggambarkan perubahan kekayaan bersih instansi selama periode pelaporan.

Dengan demikian, Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta didukung oleh data Catatan atas Laporan Keuangan dan hasil wawancara bagian keuangan.

3. Hasil Analisis Sistem Akuntansi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari input, proses, output, kontrol, dan sumber daya adalah sebagai berikut :

a. Input

Input dalam sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berupa dokumen sumber transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar pencatatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan, dokumen yang digunakan meliputi Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Pertanggungjawaban, bukti pengeluaran, bukti penerimaan, daftar gaji pegawai, serta dokumen pengadaan barang dan jasa. Seluruh dokumen tersebut harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan dalam sistem keuangan daerah.

Selain itu, input juga berasal dari Buku Kas Umum bendahara pengeluaran, buku pembantu, serta dokumen

terkait pengelolaan aset. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi sistem keuangan daerah untuk diolah menjadi laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 menunjukkan bahwa data input tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.¹⁶

Berdasarkan analisis, sistem input yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan karena menggunakan dokumen sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban kegiatan dari bidang teknis ke bagian keuangan. Kondisi ini menyebabkan pencatatan transaksi tidak selalu dilakukan secara tepat waktu. Selain itu, beberapa dokumen masih memerlukan perbaikan administratif sebelum dilakukan input ke dalam sistem, sehingga proses pencatatan menjadi lebih lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara prosedural telah sesuai dengan SAP.

b. Proses

Proses dalam sistem akuntansi keuangan meliputi tahapan pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, hingga pelaporan transaksi keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, proses pencatatan dilakukan oleh bendahara pengeluaran yang kemudian diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan sebelum diinput ke dalam aplikasi sistem keuangan daerah. Setelah seluruh transaksi dicatat, bagian keuangan melakukan rekonsiliasi antara data buku kas dengan laporan sistem.

¹⁶ Purnamasari, I., & Nugroho, L. (2020). Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 223–234.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 menjelaskan bahwa proses akuntansi dilakukan dengan menggunakan basis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, pada akhir periode pelaporan dilakukan penyesuaian seperti pencatatan penyusutan aset tetap serta koreksi terhadap kesalahan pencatatan yang ditemukan.¹⁷

Berdasarkan analisis, proses akuntansi telah berjalan sesuai siklus akuntansi pemerintah. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi masih dilakukan secara manual pada beberapa tahapan. Hal ini menyebabkan proses penyusunan laporan memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, pengolahan data masih bergantung pada operator tertentu sehingga berpotensi menimbulkan kendala apabila terjadi pergantian pegawai. Meskipun system akuntansi telah berbasis aplikasi, namun praktik di lapangan masih menunjukkan penggunaan metode manual pada beberapa tahapan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam system informasi akuntansi modern, sehingga berpotensi memperlambat proses penyusunan laporan keuangan.

c. Output

Output dari sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut disusun setiap akhir periode pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban

¹⁷ Karmila, S., Tinangon, J., & Gamaliel, H. R. N. W. (2021). Analisis perlakuan akuntansi atas belanja modal pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 494–505

pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara Bersama Inspektorat yang mengatakan bahwa :

“pelaporan keuangan yang seharusnya rampung dan harus di sampaikan pada akhir tahun 2025, namun mereka baru sampaikan pada januari 2026”. (2026/02/11)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Inspektorat, diketahui bahwa penyampaian laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengalami keterlambatan, dimana laporan yang seharusnya diselesaikan dan disampaikan pada akhir tahun 2025 baru direalisasikan pada bulan Januari 2026.¹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi output, meskipun sistem akuntansi keuangan telah mampu menghasilkan laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan komponen yang dipersyaratkan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan), namun ketepatan waktu penyajian laporan masih belum optimal. Ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang penting karena berpengaruh terhadap relevansi informasi yang disajikan dalam pengambilan keputusan.

4. Evaluasi yang diharapkan dari Analisis Sistem Akuntansi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan bahwa secara umum sistem yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar

¹⁸ Imelda Putri, R. F. W., Attallah, S. A., & Meidiyustiani, R. (2025). Implementasi akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah Indonesia. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 20(6), 121–130.

yang berlaku. Hal ini terlihat dari penggunaan aplikasi keuangan daerah sebagai alat utama dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, serta adanya alur prosedur yang jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penerapan sistem ini menunjukkan bahwa dinas telah berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.¹⁹

Meskipun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi guna meningkatkan kualitas sistem akuntansi yang diterapkan. Evaluasi ini penting dilakukan agar sistem yang sudah berjalan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mampu mencapai efektivitas dan efisiensi yang optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung proses akuntansi. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa jumlah perangkat komputer dan laptop yang tersedia masih terbatas dan sebagian dalam kondisi kurang layak pakai. Hal ini tentu dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam mengolah data keuangan, terutama pada saat penyusunan laporan keuangan yang membutuhkan ketelitian dan kecepatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan fasilitas teknologi informasi yang memadai guna menunjang kelancaran proses akuntansi dan pelaporan keuangan.

Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, meskipun pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan telah memiliki pengalaman kerja dan pernah mengikuti pelatihan, namun

¹⁹ Equivalent. (2023). Analysis of the implementation of government accounting system at the Gunungsitoli Utara District Office. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi*

kompetensi yang dimiliki masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Tidak semua pegawai memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga dalam beberapa kondisi masih terdapat ketergantungan pada pihak eksternal dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih intensif dan spesifik sangat diperlukan. Dengan demikian, diharapkan pegawai mampu memahami dan mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan secara lebih optimal.

Dalam aspek proses akuntansi, secara umum alur yang diterapkan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti penggunaan dokumen pendukung dan mekanisme pengeluaran kas melalui sistem uang persediaan dan ganti uang. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal ketelitian pencatatan dan penginputan data. Kesalahan sederhana seperti kesalahan pengetikan masih dapat terjadi dan berpotensi mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengendalian internal, seperti penerapan sistem verifikasi berlapis dan pemanfaatan fitur validasi dalam aplikasi keuangan daerah.

Selanjutnya, dalam aspek pelaporan keuangan, diketahui bahwa tidak seluruh laporan keuangan disusun secara mandiri oleh dinas. Salah satu contohnya adalah laporan arus kas yang masih disusun pada tingkat pemerintah provinsi melalui proses rekapitulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah terintegrasi, namun kapasitas dinas dalam menyusun laporan secara lengkap masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diharapkan ke depan dinas dapat mengembangkan kemampuannya dalam menyusun seluruh komponen laporan keuangan secara

mandiri, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kualitas pelaporan keuangan.

Dari sisi pengendalian internal, mekanisme yang diterapkan sudah cukup baik, seperti adanya pengecekan berulang terhadap dokumen keuangan serta pelaksanaan rapat evaluasi secara berkala. Keterlibatan pimpinan dalam melakukan pengawasan juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun demikian, sistem pengendalian internal tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Misalnya, dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci serta memanfaatkan teknologi untuk melakukan monitoring secara real-time.²⁰

Selain itu, integrasi sistem informasi keuangan juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Meskipun telah menggunakan beberapa aplikasi seperti SIPD dan aplikasi lainnya, namun optimalisasi pemanfaatan sistem tersebut masih perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar seluruh proses akuntansi dapat berjalan secara terintegrasi dan meminimalisir terjadinya duplikasi data maupun kesalahan dalam pencatatan. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat, tepat waktu, dan relevan.

Evaluasi lainnya juga berkaitan dengan pemanfaatan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pengambilan keputusan masih sangat bergantung pada sistem yang telah terprogram dalam aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan

²⁰ Badewin, E., Roosganda, E., Rusmardiana, A., & Judijanto, L. (2025). Accountability and transparency in local government financial reporting: An empirical study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831–842.

pemahaman terhadap laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Dengan berbagai evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan dan pengembangan. Perbaikan tersebut meliputi peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan kualitas pengendalian internal, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan.

Dengan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan sistem akuntansi keuangan yang diterapkan dapat semakin efektif, efisien, dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mampu memberikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance).

5. Kendala Sistem Akuntansi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Meskipun penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Kendala tersebut teridentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan

pihak Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah selaku aparat pengawas internal pemerintah. Temuan wawancara menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi meliputi aspek kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, pelaksanaan pencatatan yang masih semi manual, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung, serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Berbagai kendala tersebut menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntansi keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, diperoleh informasi bahwa masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Informan menyatakan bahwa:

“Untuk data keuangan nya sudah sesuai ketentuan, namun saat pengumpulan data untuk evaluasi masih ada catatan sumber-sumber pertanggungjawaban yang harus dipenuhi masih kurang lengkap, jadi seharusnya untuk verifikasi nya harus lebih tegas.”
(2026/02/11)

Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa:

“Saat melakukan evaluasi pertanggungjawaban masih banyak yang kurang, seperti laporan kegiatannya tidak ada atau dokumentasinya yang tidak ada.” (2026/02/11)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa meskipun data keuangan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kelengkapan dokumen pendukung

21

masih menjadi kendala dalam penerapan sistem akuntansi. Ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban dapat menghambat proses verifikasi dan berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kendala berikutnya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sistem akuntansi. Bendahara Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa :

“Tidak, laptop tidak cukup ada yang sudah rusak, komputer hanya satu dan sudah lama, printer hanya beberapa, namun kita paksakan cukup untuk menyelesaikan laporan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis berpendapat bahwa keterbatasan fasilitas teknologi informasi dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem akuntansi. Ketersediaan perangkat yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung proses pengolahan data dan penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh penggunaan aplikasi SIPD. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kendala tersebut meliputi belum lengkapnya dokumen pertanggungjawaban, proses pencatatan yang masih semi manual, kompetensi sumber daya manusia yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pegawai, penguatan fungsi verifikasi, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta peningkatan kedisiplinan dalam

pelaporan guna mendukung terciptanya sistem akuntansi keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan pihak Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sistem akuntansi keuangan. Upaya tersebut dilakukan pada aspek sumber daya manusia, pengendalian internal, sarana dan prasarana, serta pengawasan pelaporan keuangan.

Dalam aspek sumber daya manusia, Dinas Pariwisata berupaya meningkatkan kompetensi pengelola keuangan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Selain itu, pegawai yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas juga melakukan konsultasi dan meminta bantuan kepada pihak yang lebih memahami pengelolaan keuangan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bendahara Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa meskipun tidak semua pegawai memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, kemampuan mereka terus meningkat melalui pelatihan dan pengalaman kerja yang dilakukan secara berulang.²² Pada aspek pengendalian internal, upaya yang dilakukan untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan adalah melalui pengecekan dokumen secara berulang oleh beberapa pihak sebelum dokumen tersebut diproses lebih lanjut. Selain itu, pihak Inspektorat juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data dan dokumen yang diperlukan sebelum pelaksanaan evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dokumen pertanggungjawaban telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi.

²² World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: World Bank

Selanjutnya, dalam menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sistem akuntansi, Dinas Pariwisata tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia meskipun beberapa perangkat mengalami kerusakan dan jumlahnya masih terbatas. Perangkat yang ada dimanfaatkan secara maksimal agar proses penyusunan laporan keuangan tetap dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya mengatasi berbagai kendala dalam penerapan sistem akuntansi keuangan melalui peningkatan kompetensi pegawai, penguatan pengendalian internal, optimalisasi sarana yang tersedia, dan pelaksanaan pengawasan secara berkala. Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat mengatasi kendala secara lebih optimal, khususnya dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, serta penguatan fungsi verifikasi dan pengawasan dokumen pertanggungjawaban

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah secara umum telah berjalan dengan baik dan telah mengacu pada standar serta regulasi akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proses pencatatan transaksi yang telah menggunakan basis akrual, penyusunan laporan keuangan yang lengkap, serta adanya prosedur pengolahan data keuangan yang sistematis. Sistem yang digunakan juga telah mampu menghasilkan

laporan keuangan seperti Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara periodik sehingga dapat mendukung penyediaan informasi keuangan yang relevan dalam pengambilan keputusan.

2. Dalam penerapan sistem akuntansi keuangan masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan, ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban, keterlambatan penyampaian laporan keuangan, penggunaan sistem yang masih dilakukan secara semi manual, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Pariwisata telah melakukan berbagai upaya, seperti mengikuti pelatihan, melakukan konsultasi dengan pihak yang lebih memahami pengelolaan keuangan, menerapkan pengecekan dokumen secara berulang, mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia, serta melaksanakan rapat evaluasi dan pengawasan secara berkala. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar penerapan sistem akuntansi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan fungsi verifikasi dan pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem dan sarana pendukung guna meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait akuntansi pemerintahan. Hal ini bertujuan agar pegawai memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur dan standar akuntansi yang berlaku sehingga proses penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.
2. Perlu adanya peningkatan koordinasi antar bidang dalam penyampaian dokumen dan data keuangan. Koordinasi yang baik akan membantu mempercepat proses pencatatan transaksi serta meminimalkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi keuangan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan sistem secara maksimal dapat membantu meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, serta akurasi dalam penyusunan laporan keuangan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif serta menjadi bahan referensi bagi pengembangan sistem akuntansi di instansi pemerintah.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem akuntansi keuangan serta kualitas penyusunan laporan keuangan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTKA

Jurnal

- Badewin, E., Roosganda, E., Rusmardiana, A., & Judijanto, L. (2025). Accountability and transparency in local government financial reporting: An empirical study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831–842.
- Equivalent. (2023). Analysis of the implementation of government accounting system at the Gunungsitoli Utara District Office. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi*.
- Imelda Putri, R. F. W., Attallah, S. A., & Meidiyustiani, R. (2025). Implementasi akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah Indonesia. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 20(6), 121–130.
- Karmila, S., Tinangon, J., & Gamaliel, H. R. N. W. (2021). Analisis perlakuan akuntansi atas belanja modal pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 494–505.
- Purnamasari, I., & Nugroho, L. (2020). Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 223–234.
- Putri, R. A., & Widiyanti, L. (2021). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4), 1–18. Retrieved from

- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian kualitatif. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 1(2), 1–8.
- Safitri, E., Amiruddin, Selong, A., Tenriwaru, & Basalamah, M. S. A. (2023). Pemahaman standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. *Center of Economic Students Journal*, 6(1), 22–30.
- Sari, A., & Wahyuni, L. A. (2023). Analisis pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kinerja SDM terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *JAKU: Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 59–66.
- Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2024). Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(1), 59–70.
- Sumual, E. M., Saerang, D. P. E., & Budiarso, N. S. (2016). Analisis efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 273–284.
- Tabupook, A., & Wulandari, R. (2024). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 12(1), 45–56.
- Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. (2024). *Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024*. Palu: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, J. A. (2020). *Accounting information systems* (10th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2011). *Grand design reformasi birokrasi 2010–2025*. Jakarta: KemenPAN-RB.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). New York: Pearson.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: World Bank.